



**DEPUTI BIDANG
PEMBERDAYAAN PEMUDA**

LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2024



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Satker Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora 418137 adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan **Satker Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora 418137** mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada **Satker Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora 418137**. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Desember 2024
Kuasa Pengguna Anggaran
Satker Bidang Pemberdayaan Pemuda TA 2024,



Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Soleh, M.A



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Pernyataan Telah Direviu	iv
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	6
III. Laporan Operasional	7
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	8
V. Catatan atas Laporan Keuangan	9
A. Pendahuluan	9
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	17
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	28
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	33
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	39
F. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya	42
VI. Lampiran dan Daftar	



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satker Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora 418137 yang terdiri dari *Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024* sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Desember 2024

Kuasa Pengguna Anggaran

Satker Bidang Pemberdayaan Pemuda TA 2024,



Dr. H. M. Asrorun Ni'am Soleh, M.A



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN SATKER PEMBERDAYAAN PEMUDA KEMENPORA 418137
PERIODE 31 DESEMBER 2024**

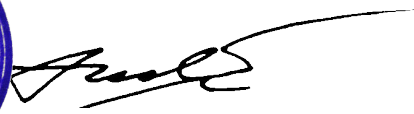
Kami telah mereviu **Laporan Keuangan Satker Pemberdayaan Pemuda Kemenpora 418137** untuk **periode 31 Desember 2024** berupa **Neraca per tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan** untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen **Satker Pemberdayaan Pemuda Kemenpora 418137**.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003** tentang **Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010** tentang **Standar Akuntansi Pemerintahan** dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, Desember 2024
Kuasa Pengguna Anggaran
Satker Bidang Pemberdayaan Pemuda TA 2024,




Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Soleh, M.A



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan **Satker Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora Periode 31 Desember Tahun Anggaran 2024** ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang **Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)** dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode **1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024**.

Realisasi Pendapatan Negara periode **31 Desember 2024** adalah berupa **Pendapatan Negara Bukan Pajak** sebesar **Rp509.683.940** atau mencapai **0%** dari estimasi Pendapatan LRA sebesar **Rp0**.

Realisasi Belanja Negara pada periode **31 Desember 2024** adalah sebesar **Rp80.653.210.752** atau mencapai **96%** dari alokasi anggaran sebesar **Rp83.982.517.000**.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai **Aset, Kewajiban, dan Ekuitas** pada **31 Desember 2024**.

Nilai **Aset** per **31 Desember 2024** dicatat dan disajikan sebesar **Rp436.566.789** yang terdiri dari **Aset Lancar** sebesar **Rp403.819.289**, **Aset Tetap (neto)** sebesar **Rp32.747.500**, **Piutang Jangka Panjang (neto)** sebesar **Rp0**, dan **Aset Lainnya (neto)** sebesar **Rp0**.

Nilai **Kewajiban** dan **Ekuitas** masing-masing sebesar **Rp325.535.171** dan **Rp111.031.618**.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. **Pendapatan-LO** untuk periode sampai dengan **31 Desember 2024** adalah sebesar **Rp10.113.649** sedangkan **jumlah beban adalah**



sebesar **Rp80.658.044.740** sehingga terdapat **Defisit dari Kegiatan Operasional** senilai **Rp80.647.931.091**. **Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos Luar Biasa** masing-masing sebesar **Rp217.055.437** dan sebesar **Rp0** sehingga entitas mengalami **Defisit-LO** sebesar **Rp80.430.875.654**.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. **Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024** adalah sebesar **Rp398.380.460** dikurangi **Defisit-LO** sebesar **Rp80.430.875.654** kemudian ditambah dengan Penyesuaian Nilai Aset senilai **Rp0** dan ditambah dengan Koreksi-Koreksi dan Transaksi Antar Entitas senilai **Rp0** dan **Rp80.143.526.812** sehingga Ekuitas Entitas pada tanggal **31 Desember 2024** adalah senilai **Rp111.031.618**.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas periode 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.



I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

SATKER BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024				2023			
		Anggaran	Realisasi	Realisasi di atas (bawah) terhadap Anggaran	%	Anggaran	Realisasi	Realisasi di atas (bawah) terhadap Anggaran	%
A. Pendapatan Negara dan Hibah		0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan		0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional		0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0	509.683.940	509.683.940	0	0	165,394,398	(165,394,398)	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan		0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU		0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya		0	509.683.940	509.683.940	0	0	165,394,398	(165,394,398)	0
III. Pendapatan Hibah		0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		0	509.683.940	509.683.940	0	0	165,394,398	(165,394,398)	0



Laporan Keuangan
Satker Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora 418137
Periode 31 Desember 2024

Uraian	Catatan	2024				2023			
		Anggaran	Realisasi	Realisasi di atas (bawah) terhadap Anggaran	%	Anggaran	Realisasi	Realisasi di atas (bawah) terhadap Anggaran	%
B. Belanja Negara		0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	B.2	83.982.517.000	80.653.210.752	(3.329.306.248)	96	82,865,009,084	82.865.009.084	1.125.951.916	99
1. Belanja Pegawai	B.3	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	B.4	83.982.517.000	80.653.210.752	(3.329.306.248)	96	82.865.009,084	82.865.009.084	1.125.951.916	99
3. Belanja Modal	B.5	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang		0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi		0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah		0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial		0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain – lain		0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa		0	0	0	0	0	0	0	0
1. Transfer ke Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Perimbangan		0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum		0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil		0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus		0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik		0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik		0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY		0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa		0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0



Laporan Keuangan
Satker Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora 418137
Periode 31 Desember 2024

Uraian	Catatan	2024				2023			
		Anggaran	Realisasi	Realisasi di atas (bawah) terhadap Anggaran	%	Anggaran	Realisasi	Realisasi di atas (bawah) terhadap Anggaran	%
Jumlah Belanja Negara		83.982.517.000	80,653,210,752	(3.329.306.248)	96	83.990.961.000	82.865.009.084	1.125.951.916	99
C. Pembiayaan		0	0	0	0	0	0	0	0



II. NERACA

SATKER BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA KEMENPORA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1	325.535.171	0
Piutang Bukan Pajak	C.2	78.725.649	327.628.503
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.3	(441.531)	(1.638.143)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)		78.284.1187	325.990.360
JUMLAH ASET LANCAR		403.819.2892	325.990.360
ASET TETAP			
Peralatan dan Mesin	C.4	1.587.525.000	1.587.525.000
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.5	(1.554.777.500)	(1.515.134.900)
JUMLAH ASET TETAP		32.747.500	72.390.100
JUMLAH ASET		436.566.789	398.380.460
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.6	324.423.640	0
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.7	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.8	0	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.9	1.111.531	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		325.535.171	0
JUMLAH KEWAJIBAN		325.535.171	0
EKUITAS			
Ekuitas	C.10	111.031.618	398.380.460
JUMLAH EKUITAS		111.031.61	398.380.460
JUMLAH EKUITAS		111.031.61	398.380.460
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		436.566.789	398.380.460



III. LAPORAN OPERASIONAL

SATKER BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA KEMENPORA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	10.113.6490	5.136.205
JUMLAH PENDAPATAN		0	(5.136.205)
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	0	0
Beban Persediaan	D.3	0	0
Beban Barang dan Jasa	D.4	25.116.827.417	22.114.011.174
Beban Pemeliharaan	D.5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D.6	26.871.823.685	26.170.796.212
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	28.630.947.6500	34.319.290.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	39.642.600	89.242.700
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	(1.196.612))	1.614.292
JUMLAH BEBAN		80.658.044.740	82.694.954.378
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(80.647.931.091)	(82.689.818.173)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.10		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Surplus/Defisit dari Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya		(217.055.437)	(205.204.800)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		217.055.437	205.204.800
JUMLAH SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		217.055.437	205.204.800
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(80.430.875.654)	(82.484.613.373)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNB		0	0
Beban Perjalanan Dinas		0	0
Beban Persediaan		0	0
SURPLUS/DEFISIT LO		(80.430.875.654)	(82.484.613.373)



IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

SATKER BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA KEMENPORA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
EKUITAS AWAL	E.1	398.380.460	166.379.147
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(80.430.875.654)	(82.484.613.373)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	0	17.000.000
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.4.3	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	E.4.4	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.4.5	0	0
LAIN-LAIN	E.4.6	0	17.000.000
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	80.143.526.812	82.699.614.686
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.6	(287.348.842)	232.001.313
EKUITAS AKHIR	E.7	111.031.618	398.380.460



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Satker Bidang Pemberdayaan Pemuda

Satker Bidang Pemberdayaan Pemuda adalah Satuan Kerja yang bertanggung jawab kepada Menteri dan dipimpin oleh seorang Deputi. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang karakter pemuda, wawasan pemuda, potensi kemandirian pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan serta bina prasarana dan sarana pemuda. Satker Bidang Pemberdayaan Pemuda adalah salah satu Satuan Kerja di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berkedudukan di Gedung Wisma Lantai 1 Jalan Gerbang Pemuda No 3 Senayan, Jakarta.

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan **periode 31 Desember 2024** ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satker Bidang Pemberdayaan Pemuda. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran SAKTI terdiri dari beberapa modul meliputi Modul Penganggaran, Modul Komitmen, Modul Pembayaran, Modul Bendahara, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Pelaporan, Modul Piutang dan Modul Administrator.

SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas dan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya yang dilakukan secara system elektronik dengan konsep single database laporan barang milik negaraserta laporan manajerial lainnya yang dilakukan melalui sistem elektronik dengan konsep single database.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Satker Bidang Pemberdayaan Pemuda menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi

dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satker Bidang Pemberdayaan Pemuda dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Satuan Kerja Bidang Pemberdayaan Pemuda Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini, merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker Bidang Pemberdayaan Pemuda adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara, yang menambah Saldo Anggaran Lebih, dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh

pemerintah.

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat, yang diakui sebagai penambah ekuitas, dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara, yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih, dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.



- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

(6) Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir.

Aset Tetap

(7) Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih

dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

(8) Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

(9) Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, dan aset lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.



- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(10) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(11) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih*

(12) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.



Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan Aset Tetap

(13) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang, berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara



merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. Pendapatan

**Realisasi
Pendapatan
Rp509,684
juta**

Realisasi Pendapatan sampai dengan **31 Desember 2024** adalah sebesar **Rp509.683.940**, atau mencapai **0%** dari nilai estimasi pendapatan sebesar **Rp0**. Penerimaan pendapatan berasal dari penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu dan pendapatan anggaran lain-lain.

Tabel 1. Estimasi dan Realisasi PNBPN Periode 31 Desember 2024

Kode	Uraian	Pendapatan (Rp)		Realisasi Anggaran %
		Estimasi	Realisasi	
4259	Pendapatan Lain-Lain	0	509.683.940	0%
Jumlah Pendapatan		0	509.683.940	0%

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir **31 Desember 2024** adalah sebesar **Rp Rp509.683.940** Pendapatan pada Satker Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora merupakan penerimaan pendapatan berasal dari penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu dan pendapatan anggaran lain-lain sampai dengan tanggal pelaporan tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Rincian PNBPN Umum Periode 31 Desember 2024

No	Akun	Uraian	Pendapatan (Rp)
1	4259	Pendapatan Lain-Lain	509.683.940
	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	504.547.735
	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	5.136.205
Jumlah			509.683.940

Realisasi pendapatan untuk periode **31 Desember 2024** adalah sebesar **Rp509.683.940**. Di bawah ini merupakan tabel perbandingan realisasi PNBPN periode **31 Desember 2024** dan periode **31 Desember 2023**:

Tabel 3. Perbandingan Realisasi PNBPN

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)	Naik (Turun) %
Pendapatan Lain-Lain	Rp509.683.940	165.394.398	208%
Jumlah	Rp509.683.940	165.394.398	208%)

Dari tabel perbandingan realisasi PNBPN dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

Realisasi **Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (425912)** adalah sebesar **Rp 504.547.735** dengan rincian sebagai berikut:

- Pengembalian Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Kelebihan Pembayaran Paket Meeting TA 2023 pada Sekretariat Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda sebesar **Rp2.560.000**;



- Pengembalian Belanja Bantuan Pemerintah KIPAN TAYL 2023 pada Asisten Deputy Karakter Pemuda dengan NTPN AB3C255DF9CCK33I sebesar *Rp157.640.000*;
- Pengembalian Tindak Lanjut Temuan Inspektorat terkait Perjalanan Dinas pada unit Sekretariat Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda dengan NTPN 36F7B1JNFUMEFG1 sebesar *Rp7.407.800*;
- Pengembalian tindak lanjut temuan Inspektorat (Kelebihan Paket Meeting) T.A 2023 Asisten Deputy Karakter dengan NTPN 766236U8EU4OTUNN sebesar *Rp41.977.298*;
- Pengembalian Belanja Perjadin Non Pegawai Kemenpora TA 2023 Asisten Deputy Wawasan Pemuda dengan NTPN 149A26U8EU4T8GMJ sebesar *Rp54.463.583*;
- Pengembalian tindak lanjut temuan Inspektorat (Honor Staf Pengelola Keuangan) T.A 2023 Sekretariat Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda sebesar *Rp13.950.000*;
- Pengembalian Sisa Bantuan Dana Beasiswa Universitas Indonesia a.n. Arjuna Putra Aldino Tahun 2020 pada Asisten Deputy Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda dengan NTPN A2BD148VVEGTQ2QF sebesar *Rp17.000.000*;
- Pengembalian Tindak Lanjut Temuan pada Asisten Deputy Karakter Pemuda sebesar *Rp135.553.017.000*;
- Pengembalian Tindak Lanjut Temuan Tahun 2015 pada Asisten Deputy Wawasan Pemuda dengan NTPN CC2A77QLUP8V72V4 sebesar *Rp10.251.300*;
- Pengembalian Temuan Inspektorat Tahun 2023 pada Asisten Deputy Wawasan Pemuda dengan NTPN D10E048VVEVDIV26 sebesar *Rp9.580.600*;
- Pengembalian Tindak Lanjut Temuan Inspektorat (Honor Narasumber Internal) TA 2023 pada Asisten Deputy Wawasan Pemuda dengan NTPN E72BF8N3EJ9HNPSF sebesar *Rp5.000.000*;
- Pengembalian Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2013 No. 1.2.2.d atas Perjalanan Dinas pada Asisten Deputy Organisasi Kepemudaan dengan NTPN B04432G4VPOA0CF6 sebesar *Rp4.288.137*;
- Pengembalian Tindak lanjut temuan BPK RI atas Pemeriksaan Belanja Bantuan Pemerintah KMHD TA 2023 pada Asisten Deputy Wawasan Pemuda dengan NTPN 7CEA11JNFVKU85NF sebesar *Rp18.150.000*;
- Pengembalian Tindak Lanjut Temuan BPK RI atas Pemeriksaan Belanja Tahun 2023 Kegiatan Kreativesia di Solo Asisten Deputy Potensi Kemandirian Pemuda dengan NTPN F2B261JNFVN6K0D5 sebesar *Rp14.726.000*;
- Pengembalian Tindak lanjut temuan BPK RI atas Bantuan Pemerintah pada Asisten Deputy Wawasan Pemuda dengan NTPN D19CD3CIFKS1IT01 sebesar *Rp12.000.000*.

Realisasi **Pendapatan Anggaran Lain-lain (425999)** sebesar *Rp5.136.205*. Pendapatan 425999 merupakan pengembalian Jasa Giro oleh Kwartir Nasional Gerakan Pemuda Asisten Deputy Organisasi Kepemudaan dan Kepemudaan Tahun 2023 sebesar *Rp5.136.205*. Pembayaran telah dilakukan pada tanggal 17 Mei 2024 dengan NTPN 876307QLUOQ4S0CV.



**Realisasi
Belanja
Rp80,653
miliar**

B.2 Belanja

Realisasi Belanja periode **31 Desember 2024** adalah sebesar **Rp80.653.210.752** atau mencapai **96%** dari anggaran belanja sebesar **Rp83.982.517.000**. Rincian anggaran dan realisasi belanja **Tahun 2024** adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Periode 31 Desember 2024

Uraian	Belanja		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Anggaran (%)
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	83.982.517.000	80.653.210.752	96%
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja Kotor	83.982.517.000	80.653.210.752	96%
Pengembalian Belanja	0	0	0%
Jumlah	83.982.517.000	80.653.210.752	96%

Rincian anggaran dan realisasi belanja per akun untuk Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



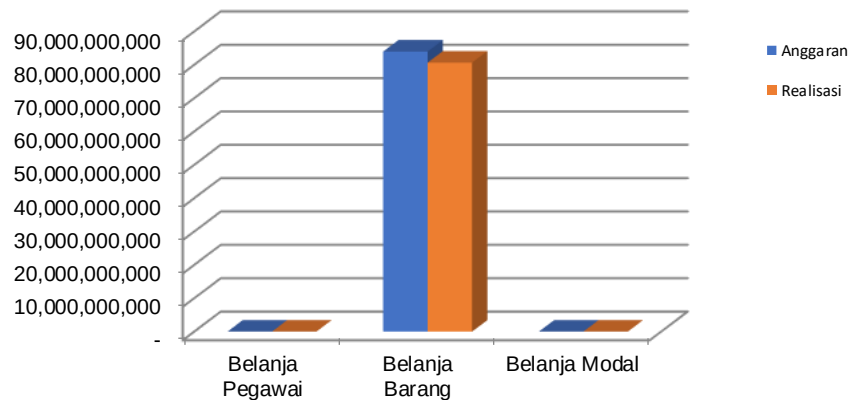
Laporan Keuangan
Satker Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora 418137
Periode 31 Desember 2024

Tabel 5. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Akun Tahun 2024 dan Tahun 2023

No	Akun	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (%)
1	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	716.863.000	699.783.664	97,62%	253.391.495	176,2%
2	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	0	0	-	
3	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	0	0	298.000	-100%
4	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	496.080.000	483.360.000	97,44%	473.484.100	2,1%
5	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	15.000.000	14.713.387	98,09%	0	
6	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0	13.600.000	-100%
7	521211	Belanja Bahan	4.624.508.000	4.529.560.989	97,95%	4.424.238.805	2,4%
8	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	164.100.000	158.900.000	96,83%	371.270.000	-57,2%
9	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	80.600.000	80.600.000	100%	0	100%
10	521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	1.024.000.000	1.024.000.000	100%	213.500.000	379,6%
11	521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang	1.000.000.000	1.000.000.000	100%	792.204.900	26,2%
12	522131	Belanja Jasa Konsultan	96.121.000	94.488.750	98,3%	0	100%
13	522141	Belanja Sewa	3.048.026.000	3.045.500.636	99,92%	2.156.690.000	41,2%
14	522151	Belanja Jasa Profesi	1.962.351.000	1.876.580.000	95,63%	2.289.750.000	-18%
15	522191	Belanja Jasa Lainnya	12.188.563.000	12.109.339.991	99,35%	11.144.533.874	8,7%
16	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.320.151.000	11.922.638.092	89,51%	11.624.303.598	2,6%
17	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	55.480.000	49.900.000	89,94%	228.960.000	-78,2%
18	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.344.083.000	4.867.818.348	91,09%	3.908.859.882	24,5%
19	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	9.110.577.000	8.692.537.970	95,41%	9.748.377.778	-10,8%
20	524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	1.696.014.000	1.338.929.275	82,16%	816.478.852	64,0%
21	524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	0	0	0	85.777.800	-100%
22	526122	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat dalam bentuk uang	4.240.000.000	4.234.559.650	99,88%	6.800.000.000	-37,7%
23	526123	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk uang	1.750.000.000	1.750.000.000	100%	0	100%
24	526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	0	0	0%	-	
25	526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik	23.050.000.000	22.680.000.000	98,39%	27.519.290.000	-17,6%
Total			83.982.517.000	80.653.210.752	96,1%	82.865.009.084	-2,7%



Komposisi anggaran dan realisasi belanja **Periode 31 Desember 2024** dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi belanja **periode 31 Desember 2024** sebesar **Rp80.653.210.752** mengalami penurunan sebesar **Rp2.211.798.332** atau -2,7% dibandingkan **periode 31 Desember 2023** sebesar **Rp82.865.009.084**. Perbandingan Realisasi Belanja **periode 31 Desember 2024** dan **31 Desember 2023** tersaji pada tabel berikut:

Tabel 6. Perbandingan Realisasi Belanja

Uraian	Realisasi		
	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Naik/(Turun) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	80.653.210.752	82.865.009.084	-2,7%
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	80.653.210.752	82.865.009.084	-2,7%

Dari tabel perbandingan realisasi belanja dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut bahwa terdapat penurunan belanja barang sebesar **Rp2.211.798.332** atau -2,7% hal ini disebabkan oleh adanya revisi DIPA penghematan anggaran belanja perjalanan dinas K/L T.A 2024.

B.2 Belanja Barang

**Belanja
Barang
Rp80,653
miliar**

Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 setelah dikurangi dengan pengembalian belanja adalah masing-masing sebesar **Rp80.653.210.752** dan **Rp82.865.009.084** sehingga mengalami penurunan sebesar **Rp Rp2.211.798.332** atau -2,7%%. Perbandingan belanja barang adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Perbandingan Belanja Barang

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja Barang		
	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Naik/(Turun) %
Belanja Barang Operasional	1.197.857.051	740.773.594	61,7%
Belanja Barang Non Operasional	6.793.060.989	5.801.213.705	17,1%



Belanja Barang Persediaan	-	-	-
Belanja Jasa	17.125.909.377	15.590.973.874	9,8%
Belanja Pemeliharaan	-	-	-
Belanja Perjalanan dalam Negeri	25.532.894.410	25.510.501.258	0,1%
Belanja Perjalanan Luar Negeri	1.338.929.275	902.256.652	48,4%
Belanja Barang BLU	-	-	-
Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	5.984.559.650	6.800.000.000	-12%
Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan ke Masyarakat /Pemda	22.680.000.000	27.519.290.000	-17,6%
Jumlah Belanja Kotor	80,653,210,752	82.865.009.084	-2,7%
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja Bersih	80,653,210,752	82.865.009.084	-2,7%

1. **Realisasi Belanja Barang Operasional (5211) adalah sebesar [Rp1.197.857.051](#).**

Rincian Belanja Barang Operasional sebagai berikut:

- Realisasi **Belanja Keperluan Perkantoran (52111)** adalah sebesar [Rp699.783.664](#). Belanja 521111 dipergunakan untuk pembelian snack dan konsumsi rapat pimpinan, souvenir untuk kegiatan Rapat Koordinasi Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, jamuan tamu-tamu pimpinan, pembelian ATK bahan habis pakai dan bahan pendukung komputer.
- Realisasi **Belanja Honor Terkait Operasional Satuan Kerja (521115)** adalah sebesar [Rp483.360.000](#). Belanja 521115 dipergunakan untuk pembayaran honorarium KPA, honorarium PPSPM, honorarium Bendahara Pengeluaran, honorarium PPK, honorarium BPP, honorarium staf pengelola keuangan, honorarium pejabat pengadaan, honorarium tim UAKPA dan tim UAKPB selama 12 bulan periode anggaran TA 2024.
- Realisasi **Belanja Barang Operasional Lainnya (521119)** sebesar [Rp14.713.387](#). Belanja 521119 dipergunakan untuk pembayaran lisensi aplikasi Zoom Meeting dan langganan penyimpanan *google drive* pada Sekretariat Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda.

2. **Realisasi Belanja Barang Non Operasional (5212) adalah sebesar [Rp6.793.060.989](#).**

Rincian Belanja Barang Non Operasional adalah sebagai berikut:

- Realisasi **Belanja Bahan (521211)** adalah sebesar [Rp4.529.560.989](#). Belanja 521211 dipergunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan yang habis dipakai yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan operasional (pelatihan, seminar, sosialisasi, rapat, dll) yang terkait langsung dengan output suatu kegiatan seperti konsumsi, bahan cetakan, dokumentasi, biaya fotokopi, penggandaan dan penjiilidan dokumen pada seluruh unit kerja pada Satker Bidang Pemberdayaan Pemuda.
- Realisasi **Honor Terkait Output Kegiatan (521213)** adalah sebesar [Rp158.900.000](#). Belanja 521213 dipergunakan untuk pembayaran honorarium kepanitiaan yang meliputi honor penanggungjawab, honor ketua, honor wakil ketua, honor sekretaris dan honor anggota. Honorarium kegiatan dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan dan terkait dengan output antara lain pembayaran honorarium kepanitiaan dalam rangka kegiatan Program Kepemudaan meliputi kegiatan Pelatihan Kepada Generasi Milenial dalam Peningkatan Mutu di Industri Manufaktur, Penguatan Organisasi Kemahasiswaan dalam Kewaspadaan Bencana Collab Rangers, Forum Organisasi



- Kepemudaan, Pekan Kreativitas Pemuda Indonesia (Kreativesia), Pelatihan Kepada Generasi Milenial dalam Peningkatan Mutu di Industri Manufaktur, Rakornas Kepemudaan, Santri Ngaji Politik, Peningkatan Wawasan Pemuda Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kegiatan Bakti Pemuda Bangsa, dan Pelatihan Kesadaran Bela Negara Pemuda Nasional.
- c. Realisasi **Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219)** adalah sebesar **Rp80.600.000**. Belanja 521219 dipergunakan untuk Penghargaan Pemenang Kegiatan Lomba Olahraga, Lomba Ideathlon dan Pramuka berprestasi yang diselenggarakan oleh Asisten Deputy Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan serta digunakan untuk pengadaan langganan *zoom meeting* di Asisten Deputy Karakter Pemuda;
 - d. Realisasi **Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk Uang (521231)** adalah sebesar **Rp1.024.000.000**. Belanja 521213 dipergunakan oleh Asisten Deputy Potensi Kemandirian Pemuda untuk penghargaan Apresiasi Pemuda Berprestasi sebesar **Rp.500.000.000** untuk 50 orang, penghargaan utama pemuda berprestasi sebesar **Rp. 300.000.000** untuk 60 orang, penghargaan untuk Pemenang Kegiatan Kreativesia sebesar **Rp.204.000.000** dan penghargaan Pemenang Duta Pemuda Kreatif sebesar **Rp. 20.000.000**.
 - e. Realisasi **Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang (521233)** adalah sebesar **Rp1.000.000.000**. Belanja **521233** dipergunakan untuk pemberian bantuan penyelesaian karya ilmiah kepemudaan kepada 100 orang pada Asisten Deputy Potensi Kemandirian Pemuda.
3. **Realisasi Belanja Jasa (5221) sebesar Rp17.125.909.377**. Rincian Belanja Jasa adalah sebagai berikut:
- Realisasi **Belanja Jasa Konsultan (522131)** sebesar **Rp94.488.750** dipergunakan untuk Jasa Konsultan Pembuatan Standar Prasarana Gambar Gedung Wilayah III melalui Asisten Deputy Bina Prasarana dan Sarana Pemuda dalam rangka penyusunan standarisasi dalam pembangunan gedung, sehingga setiap wilayah yang akan mengajukan bantuan pemerintah berupa prasarana/pembangunan gedung harus mengacu kepada standar yang telah disusun.
4. Realisasi **Belanja Sewa (522141)** sebesar **Rp3.045.500.636**. Belanja 522141 dipergunakan untuk pembayaran sewa untuk menunjang program/kegiatan kepemudaan diantaranya untuk sewa kendaraan, sewa gedung pertemuan, sewa genset, lighting, LED dan pendukung lainnya.
 5. Realisasi **Belanja Jasa Profesi (522151)** sebesar **Rp1.876.580.000**. Belanja 522151 dipergunakan untuk pembayaran honorarium narasumber pada kegiatan di lingkungan Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda.
 6. Realisasi **Belanja Jasa Lainnya (522191)** sebesar **Rp12.109.339.991**. Belanja 522191 dipergunakan untuk membayar pekerjaan jasa lainnya atas pelaksanaan kegiatan di lingkungan Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda diantaranya digunakan untuk biaya jasa publikasi, multimedia, dokumentasi, jasa *design*, jasa penyelenggara Sentra Pemberdayaan Pemuda berbasis IPTEK dan pendukung lainnya.



7. **Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241)** adalah sebesar **Rp25.532.894.410** dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Realisasi **Belanja Perjalanan Biasa (524111)** adalah sebesar **Rp.11.922.638.092**. Belanja 524111 dipergunakan untuk keperluan Perjalanan Dinas Biasa pegawai dalam negeri di lingkungan Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda dalam rangka melaksanakan Program/Kegiatan Kepemudaan dengan rincian sebagai berikut:
 - Perjalanan Dinas Dalam Rangka Keprotokolan dan Perjalanan Dinas Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda;
 - Kegiatan Workshop, Sosialisasi, ataupun pelaksanaan kegiatan kepemudaan pada unit di Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda;
 - Monitoring dan evaluasi untuk kegiatan kepemudaan;
 - b. Realisasi **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113)** adalah sebesar **Rp49.900.000**. Belanja 524113 dipergunakan untuk membiayai pengeluaran perjalanan dinas pegawai di lingkungan Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda antara lain untuk membiayai transport koordinasi ke KPPN terkait permasalahan SAKTI dan pencairan anggaran, transportasi tim pusat dalam rangka persiapan dan koordinasi Rekomendasi Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan yang tersusun unit Karakter Pemuda, dan transportasi panitia dalam rangka kegiatan Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis Rumah Ibadah.
 - c. Realisasi **Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114)** adalah sebesar **Rp4.867.818.348**. Belanja 524114 dipergunakan untuk pengeluaran biaya perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat/meeting di dalam kota untuk mendukung Program/Kegiatan Kepemudaan seperti uang saku rapat dalam kantor, kegiatan pelatihan kepemudaan, pekerjaan paket rapat penyusunan pedoman/NSPK/Juknis, kegiatan rapat koordinasi, dll.
 - d. Realisasi **Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119)** adalah sebesar **Rp8.692.537.970**. Belanja 524119 dipergunakan untuk pengeluaran biaya perjalanan dinas (berupa paket fullboard, uang harian dan transport) dalam rangka kegiatan rapat/meeting di luar kota untuk mendukung Program/Kegiatan Kepemudaan.
8. **Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri (5242)** adalah sebesar **Rp.1.393.365.571** dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Realisasi **Belanja Perjalanan Biasa – Luar Negeri (524211)** sebesar **Rp. 1.338.929.275**. Belanja 524211 dipergunakan untuk kegiatan perjalanan dinas luar negeri pada Asisten Deputy Karakter Pemuda terkait program/kegiatan Pengiriman Delegasi dan Pendamping DA'I Muda Internasional ke Korea Selatan, Perjalanan Dinas Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda ke Bangladesh dalam rangka kegiatan 1st Meeting of the D-8 Youth Ministers, dan Perjalanan Dinas pada Asisten Deputy Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan pada kegiatan *Opening Ceremony 43th World of Scout Movement Conference* di Istana Presiden Mesir tanggal 17 s.d 21 Agustus. Terdapat pengembalian belanja perjalanan dinas luar negeri senilai Rp. 54.436.296 dengan rincian sebagai berikut:
 - Setoran Pengembalian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK atas Perjalanan Luar Negeri pada Asisten Deputy Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan SPM 00208 dengan nomor NTPN B6C23397ABVLDIQJ senilai Rp. 45.120.667;



- Setoran Pengembalian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK atas Perjalanan Luar Negeri pada Sekretariat Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda dengan nomor NTPN 333D16QT9M971J1A senilai Rp. 9.296.996.
- Setoran Pengembalian Sisa Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Asisten Deputy Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan dengan nomor NTPN 4EB451GCAMOG8LS4 senilai Rp. 18.643.

9. Realisasi Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (5261) adalah sebesar **Rp5.985.000.000** dengan rincian sebagai berikut:

- a. Realisasi **Belanja Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah (526122)** sebesar **Rp 4.234.559.650**. Belanja 526112 dipergunakan bantuan fasilitasi yang disalurkan kepada yayasan, lembaga dan komunitas pemuda melalui Asisten Deputy Bina Prasarana dan Sarana Pemuda dalam bentuk uang yang diperuntukkan pembelian Peralatan dan Mesin. Terdapat pengembalian belanja perjalanan dinas luar negeri senilai Rp. 440.350 dengan rincian sebagai berikut:
- Setoran Pengembalian Sisa Dana Bantuan Pemerintah Yayasan Pendidikan Islam Raudlatul Hikmah Parakan Pondok Benda Pamulang dengan nomor NTPN 3BAEB7NAPGR0BP4J senilai Rp. 47.200;
 - Setoran Pengembalian Sisa Belanja Bantuan Pemerintah PEPAPI PUSAT 2024 dengan nomor NTPN 6C06D2CPQHCLTP7L senilai Rp. 388.150
 - Pengembalian Belanja Sisa Dana Bantuan Pemerintah DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Balikpapan SPM 00400T dengan nomor NTPN 890887NAPG05U20T senilai Rp. 5.000.
- b. Realisasi **Belanja Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526123)** sebesar **Rp1.750.000.000**. Belanja 526113 dipergunakan untuk sebagai berikut:
- Realisasi belanja sebesar **Rp1.750.000.000** pada Satker Bidang Pemberdayaan Olahraga Kemenpora (418137) merupakan bantuan fasilitasi yang disalurkan kepada yayasan, lembaga dan komunitas pemuda melalui Asisten Deputy Bina Prasarana dan Sarana Pemuda dalam bentuk uang.

10. Realisasi Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (5263) adalah sebesar **Rp22.680.000.000** dengan rincian sebagai berikut;

Realisasi **Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah (526312)** sebesar **Rp22.680.000.000** bantuan fasilitasi yang disalurkan kepada yayasan, lembaga dan komunitas pemuda.

*Capaian
Output per
Prioritas
Nasional*

B.3 Capaian Output per Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, pada Kementerian Pemuda dan Olahraga terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu:

1. **Prioritas Nasional III: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;**
2. **Prioritas Nasional IV: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;**



3. Prioritas Nasional VII: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Target serta Realisasi Pencapaian *Output* dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

1. PN III Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

PN III dengan pagu mencapai *Rp12.438.592.000* dan realisasi sebesar *Rp12.158.837.961* atau 98% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8. Capaian Output Prioritas Nasional III

No	Uraian RO	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Satuan	%
1	3813.QEI.002 Organisasi Kepemudaan yang terfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan	5.147.680.000	4.939.626.000	95,96	50	54	Lembaga	108
2	3813.QDC.001 Pengelola Organisasi Kepemudaan yang terfasilitasi dalam Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan	3.784.040.000	3.717.469.283	98,24	2.000	4.036	Orang	202
3	3817.PEA.001 Koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan yang terlaksanakan dan dilaporkan	1.458.716.000	1.457.495.355	99,92	10	10	Kegiatan	100
4	3817.QDC.002 Pemuda Kader yang terbina dalam Pendidikan Kesadaran Bela Negara dan Anti Faham Radikalisme	2.048.156.000	2.044.247.323	99,81	3.400	3.400	Orang	100
TOTAL		12.438.592.000	12.158.837.961	98	5.460	7.500		127,5

2. Prioritas Nasional IV: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

PN IV dengan pagu mencapai *Rp11.174.226.000* dan realisasi sebesar *Rp10.995.295.879* atau 98% dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 9. Capaian Output Prioritas Nasional IV

No	Kode RO	Uraian RO	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Satuan	%
1	001	3813.QEI.001 Organisasi Kepramukaan (kwarnas/saka/sako) yang terfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan	9.142.320.000	8.966.271.330	98,07	17	36	Lembaga	212
2	001	3809.QDC.001 Pemuda Kader yang terfasilitasi dalam Peningkatan Potensi Kemandirian Pemuda	2.031.906.000	2.029.024.549	99,86	19.000	37.862	Orang	199
Jumlah			11.174.226.000	10.995.295.879	98				

3. Prioritas Nasional VII: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

PN VII dengan pagu mencapai Rp7.731.958.000 dan realisasi sebesar Rp4.492.570.651 atau 99,92% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10. Capaian Output Prioritas Nasional VII

No	Kode RO	Uraian RO	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Satuan	%
1	001	3817.QDC.001 Pemuda Kader yang terfasilitasi dalam Peningkatan Wawasan dan Peran terhadap Perubahan Global	3.429.170.000	3.425.662.500	99,90	498	498	Orang	100
2	001	5910.QDC.001 Pelatihan Kader Anti Narkoba	4.302.788.000	4.300.125.946	99,94	1.000	4774	Orang	477
Jumlah			7.731.958.000	4.492.570.651	99,92				



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

**Kas Lainnya
dan Setara
Kas
Rp325,54
juta**

C.1 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp325.535.171** dan **Rp0**. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Kas lainnya dan setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

- Belanja barang LS Bendahara untuk penghargaan pemuda yang belum dibayarkan oleh Asisten Deputi Potensi Kemandirian Pemuda sebesar **Rp218.500.000**;
- Belanja barang LS Bendahara untuk perjalanan dinas yang belum dibayarkan oleh Sekretariat Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda sebesar **Rp105.923.640**;
- Pajak bulan Desember 2024 yang belum disetorkan oleh Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan sebesar **Rp998.919**; dan
- Pajak bulan Desember 2024 yang belum disetorkan oleh Asisten Deputi Karakter Pemuda sebesar **Rp112.612**.

**Piutang
Bukan
Pajak
Rp78,72
juta**

C.2 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp78.725.649** dan **Rp0**. Piutang bukan pajak digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), meliputi seluruh penerimaan yang bukan berasal dari penerimaan perpajakan dan hibah. Mutasi Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 12. Mutasi Piutang Bukan Pajak

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Saldo Awal per 1 Januari 2024	327.628.503
2	Mutasi Tambah	43.725.649
3	Mutasi Kurang	(292.628.503)
4	Saldo per 31 Desember 2024	78.725.649

Mutasi atas Piutang Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

1. Saldo Awal per 1 Januari 2024 sebesar **Rp327.628.503**;
2. Mutasi tambah atas Piutang Lain-lain sebesar **Rp43.725.649** dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sisa dana dari penerima bantuan Kwarnas dan perorangan Tahun 2024 pada Asdep BPSP dan Asdep OKK sebesar **Rp33.612.000**



- b. Jasa giro dari bantuan TA 2024 Kwartir Nasional sebesar Rp10.113.649
- 3. Mutasi Kurang atas Piutang Lain-lain sebesar **Rp292.628.503** dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pengembalian belanja tindak lanjut temuan Inspektorat T.A. 2023 pada Sekretariat Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda sebesar Rp28.917.800;
 - b. Pengembalian belanja tindak lanjut temuan Inspektorat T.A 2023 pada Asisten Deputy Karakter Pemuda sebesar Rp177.530.315;
 - c. Pengembalian belanja tindak lanjut temuan Inspektorat T.A. 2023 pada Asisten Deputy Wawasan Pemuda sebesar Rp54.463.583.
 - d. Pengembalian sisa dana beasiswa a.n Arjuna Putra Aldino Tahun 2020 sebesar Rp17.000.000;
 - e. Pengembalian Jasa Giro oleh Kwartir Nasional Gerakan Pemuda pada Asisten Deputy Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan TA 2023 sebesar Rp5.136.205;
 - f. Pengembalian belanja tindak lanjut temuan Inspektorat T.A 2023 pada Asisten Deputy Wawasan Pemuda sebesar Rp9.580.600.

C.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

**Penyisihan
Piutang
Tidak
Tertagih -
Piutang
Bukan
Pajak
(Rp441,5
ribu)**

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar **(Rp441.531)** dan **(Rp1.638.143)**.

Penetapan nilai penyisihan piutang tidak tertagih yang disajikan dalam neraca didasarkan pada penetapan nilai sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan BUN. Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (Periode Pelaporan) dapat ditentukan sebagai berikut:

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang umum pada Kementerian/Lembaga dan BUN ditetapkan paling sedikit sebesar 5‰ (lima permil) atau 0,5% dari Piutang yang memiliki kualitas lancar;
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang khusus pada Kementerian/Lembaga dan BUN ditetapkan sebesar:
 - a. 10% (sepuluh persen) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
 - b. 50% (lima puluh persen) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
 - c. 100% (seratus persen) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;



- d. 100% (seratus persen) dari Piutang dengan kualitas macet setelah piutang diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Mutasi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

1. Saldo awal per 1 Januari 2024 adalah sebesar **(Rp750.491)**;
2. Mutasi Tambah sebesar **Rp527.588** dengan adanya settlement Piutang Lainnya
3. Mutasi Kurang sebesar **Rp218.628** dengan adanya penyisihan piutang tak tertagih - Piutang Lainnya atas sisa dana bantuan dan jasa giro bantuan Kwarnas

**Peralatan
dan Mesin
Rp1,58
miliar**

C.4 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp1.587.525.000** dan **Rp1.587.525.000**. Peralatan dan Mesin digunakan untuk mencatat peralatan dan mesin, kendaraan bermotor, alat elektronik, seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap dipakai. Peralatan dan mesin pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda berupa laptop (59 unit), mesin fotokopi (6 unit), *printer* (18 unit), dan televisi (1 unit). Selain itu, terdapat hibah dari UPT Kemenpora yakni 8 notebook dan 2 printer. Rincian Peralatan dan Mesin disajikan pada Laporan Barang Pengguna - Barang Milik Negara Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Mutasi atau perubahan nilai aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dapat diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 13. Mutasi Peralatan dan Mesin

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Nilai Perolehan Awal per 1 Januari 2024	1.587.525.000
2	Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin	0
3	Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin	0
4	Nilai Perolehan Akhir per 31 Desember 2024	1.587.525.000

Mutasi atas saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

1. Saldo Awal per 1 Januari 2023 sebesar **Rp1.587.525.000**.
2. Mutasi tambah Peralatan dan Mesin sebesar **Rp0**
3. Mutasi Kurang Sebesar **Rp0**

C.5 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

**Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp1,55
miliar**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp1.554.777.500** dan **Rp1.515.134.900**. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai, sehubungan dengan penurunan kapasitas dan



Laporan Keuangan
Satker Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora 418137
Periode 31 Desember 2024

manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai berikut:

Tabel 14. Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Awal per 1 Januari 2024	1.515.134.900
2	Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	39.642.600
3	Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Akhir per 31 Desember 2024 (1+2-3)	1.554.777.500

Mutasi atau perubahan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap diatas adalah sebagai berikut:

1. Saldo Awal per 1 Januari 2024 sebesar **Rp1.515.134.900**
2. Mutasi tambah sebesar **Rp39.642.600** terdiri atas penyusutan peralatan dan mesin tahunan
3. Mutasi Kurang sebesar **Rp0**

C.6 Utang Kepada Pihak Ketiga

**Utang
kepada
Pihak Ketiga
Rp324,42
juta**

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp324.423.640** dan **Rp0**. Utang kepada pihak ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Posisi utang pada pihak ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
a.	Belanja Barang yang masih harus dibayar	0	0
b.	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	323.423.640	0

Utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2024 sebesar **Rp324.423.640** dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja barang LS Bendahara untuk penghargaan pemuda yang belum dibayarkan oleh Asisten Deputi Potensi Kemandirian Pemuda sebesar **Rp218.500.000**;
- Belanja barang LS Bendahara untuk perjalanan dinas yang belum dibayarkan oleh Sekretariat Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda sebesar **Rp105.923.640**.



C.7 Utang yang Belum Ditagihkan

**Utang Yang
Belum
Ditagihkan
Rp0**

Saldo Utang yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Utang yang belum ditagihkan merupakan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang belum diajukan menjadi Surat Perintah Pembayaran (SPP) pada sistem modul pembayaran SAKTI 2024 per 31 Desember 2024.

C.8 Uang Muka dari KPPN

**Uang Muka
Dari KPPN
Rp0**

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Uang muka dari KPPN berasal dari saldo uang persediaan yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.9 Utang Jangka Pendek Lainnya

**Utang
Jangka
Pendek
Lainnya
Rp14,62
juta**

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang pajak Bendahara Pengeluaran yang belum disetor per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar **Rp1.111.531** dan **Rp0**. Utang jangka pendek lainnya merupakan utang pajak Bendahara Pengeluaran yang belum disetor. Saldo ini merupakan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari pajak uang persediaan dan tambahan uang persediaan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum disetorkan ke kas negara.

Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.111.531 dengan rincian sebagai berikut:

- Pajak bulan Desember 2024 yang belum disetorkan oleh Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan sebesar **Rp998.919**; dan
- Pajak bulan Desember 2024 yang belum disetorkan oleh Asisten Deputi Karakter Pemuda sebesar **Rp112.612**.

C.10 Ekuitas

**Ekuitas
Rp113,031
juta**

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp111.031.618** dan **Rp398.380.460**. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Rincian lebih lanjut tentang Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

**Pendapatan
Operasional
Rp10,11 juta**

D.1 Pendapatan Operasional

Pendapatan operasional pada **31 Desember 2024** dan **31 Desember 2023** adalah sebesar **Rp10.113.649** dan **Rp5.136.205**. Pendapatan operasional terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Saldo tersebut naik sebesar **Rp4.977.444** atau sebesar 49% dari tahun sebelumnya.

**Beban Pegawai
Rp0**

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai pada **31 Desember 2024** dan **31 Desember 2023** adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tidak terdapat selisih perbandingan antara Beban Pegawai basis akrual dan basis kas.

**Beban
Persediaan Rp0**

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan pada **31 Desember 2024** dan **31 Desember 2023** adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Beban persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Tidak terdapat selisih perbandingan antara Beban Persediaan basis akrual dan basis kas.

**Beban Barang
dan Jasa
Rp25,12 miliar**

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa pada **31 Desember 2024** dan **31 Desember 2023** adalah masing-masing sebesar **Rp25.116.827.417** dan **Rp22.114.011.174**. Saldo tersebut naik sebesar **Rp3.002.816.243** atau sebesar 13,58% dari tahun sebelumnya. Beban Barang dan Jasa terdiri dari konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan dana belanja modal yang nilainya dibawah kapitalisasi (*ekstrakomptabel*). Rincian Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Naik/(Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	699.783.664	253.391.495	176%
Beban Penambahan Daya Tahan Tubuh	0	0	0%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	298.000	(100%)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	483.360.000	459.534.100	5,2%



Beban Barang Operasional Lainnya	14.713.387	0	0%
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	13.600.000	(100 %)
Beban Bahan	4.529.560.989	4.424.238.805	2,4%
Beban Honor Output Kegiatan	158.900.000	371.270.000	(57,2%)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	80.600.000	0	0%
Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	1.024.000.000	213.500.000	379,6%
Beban Barang Pemberian Beasiswa Non PNS dalam bentuk uang	0	0	0%
Beban Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang	1.000.000.000	800.000.000	25,00%
Pengembalian Beban Barang Pemberian Bantuan Operasional	0	(7.795.100)	(100%)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0%
Beban Langganan Listrik	0	0	0%
Beban Langganan Telepon	0	0	0%
Beban Langganan Air	0	0	0%
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	0	0%
Beban Jasa Pos dan Giro	0	0	0%
Beban Jasa Konsultan	94.488.750	0	0%
Beban Sewa	3.045.500.636	2.156.690.000	41,2%
Beban Jasa Profesi	1.876.580.000	2.284.750.000	(17,9%)
Beban Jasa Lainnya	12.109.339.991	11.144.533.874	8,7%
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0%
Beban Barang	0	0	0%
Beban Jasa	0	0	0%
Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0	0	0%
Beban Barang BLU – Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0%
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	0	0%
Jumlah	25.116.827.417	22.114.011.174	13,579%

Tidak terdapat selisih perbandingan antara Beban Barang dan Jasa basis akrual dan basis kas.

**Beban
Pemeliharaan
Rp0**

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada **31 Desember 2024** dan **31 Desember 2023** adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Tidak terdapat selisih perbandingan antara Beban Pemeliharaan basis akrual dan basis kas.

**Beban
Perjalanan
Dinas Rp26,87
miliar**

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas **31 Desember 2024** dan **31 Desember 2023** adalah masing-masing sebesar **Rp26.871.823.685** dan **Rp26.170.796.212**. Saldo tersebut naik sebesar **Rp 701.027.473** atau sebesar 2,68% dari tahun sebelumnya. Beban tersebut merupakan beban



yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda. Rincian Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Naik/(Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	11.922.638.092	11.719.343.598	2,275%
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa	0	(95040000)	(100%)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	49.900.000	228.960.000	(78,206%)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.867.818.348	3.908.859.882	25,968%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	8.692.537.970	9.758.693.588	(9,670%)
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	(54.436.296)	(10.315.810)	427,698%
Beban Perjalanan Biasa – Luar Negeri	1.393.365.571	816.478.852	70,655%
Beban Perjalanan Lainnya – Luar Negeri	0	85.777.800	(100%)
Jumlah	26.871.823.685	26.170.796.212	2,679%

Tidak terdapat selisih perbandingan antara Beban Perjalanan Dinas basis akrual dan basis kas.

**Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp28,63 miliar**

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat pada **31 Desember 2024** dan **31 Desember 2023** adalah masing-masing sebesar **Rp28.630.947.650** dan **Rp34.319.290.000**. Saldo tersebut turun sebesar Rp5.688.342.350 atau sebesar 19,8% dari tahun sebelumnya. Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat merupakan bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang disalurkan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 18. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Naik/(Turun) %
Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat dalam bentuk uang	4.235.000.000	6.835.000.000	(38,04%)
Pengembalian Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan	(440.350)	(35.000.000)	(98,74%)
Beban Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	1.750.000.000	0	0%
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	22.680.000.000	27.519.290.000	(17,59%)
Pengembalian Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	(33.612.000)	0	0%



Beban Persediaan Peralatan dan Mesin untuk dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0%
Beban Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	22.680.000.000	0	0%
Jumlah	28.630.947.650	34.319.290.000	(22,05%)

**Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
Rp39,64 juta**

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi pada **31 Desember 2024** dan **31 Desember 2023** adalah masing-masing sebesar **Rp39.642.600** dan **Rp89.242.700**. Saldo tersebut turun sebesar Rp49.600.100 atau sebesar 55,58% dari tahun sebelumnya. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat penurunan nilai manfaat ekonomi Aset Tetap. Beban amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan nilai manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Naik/(Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	39.642.600	89.242.700	(55,579%)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0%
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	0	0%
Beban Penyusutan Irigasi	0	0	0%
Beban Penyusutan Jaringan	0	0	0%
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0%
Beban Amortisasi Software	0	0	0%
Beban Amortisasi Lisensi	0	0	0%
Beban Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan	0	0	0%
Jumlah	39.642.600	89.242.700	(55,579%)

Tidak terdapat selisih perbandingan antara Beban Penyusutan dan Amortisasi basis akrual dan basis kas.

**Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
(Rp1,19 juta)**

D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi piutang tak tertagih dalam suatu periode. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada **31 Desember 2024** dan **31 Desember 2023** adalah masing-masing sebesar **(Rp1.196.612)** dan **Rp1.614.292**. Saldo tersebut turun sebesar (Rp2.810.904) atau sebesar (187,67%) dari tahun sebelumnya. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Naik/ (Turun)
Beban Penyisihan Piutang PNPB	24.887	25.681	(3,17%)



Beban Penyisihan Piutang Lainnya	(1.221.499)	1.588.611	(177%)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	0	0
Jumlah	(1.415.240)	1.614.292	(60,06%)

Tidak terdapat selisih perbandingan antara Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih basis akrual dan basis kas.

Kegiatan Non Operasional
Rp217,06 juta

D.10 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi Kemenpora. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada **31 Desember 2024** dan **31 Desember 2023** adalah masing-masing sebesar **Rp217.055.437** dan **Rp205.204.800**. Saldo tersebut naik sebesar Rp11.850.637 atau sebesar 5,78%. Rincian Kegiatan Non Operasional pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Naik/(Turun) %
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0%
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0%
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0%
Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0%
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	217.055.437	205.204.800	5,775%
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0%
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	217.055.437	205.204.800	5,775%

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pendapatan Tahun Anggaran yang Lalu diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 22. Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Naik/(Turun) %
Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi – BLU (424914)	0	0	0%
Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran (424915)	0	0	0%
Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan / TGR (424917)	0	0	0%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (425911)	0	0	0%
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL (425912)	(217.055.437)	(205.204.800)	5,775%
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL (425913)	0	0	0%



Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiun (425931)	0	0	0%
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi (491111)	0	0	0%
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (491429)	0	0	0%
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan (491511)	0	0	0%
Jumlah	217.055.437	205.204.800	5,775%

Selisih antara Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pendapatan TAYL basis akrual dan kas, dijelaskan sebagai berikut:

Saldo pendapatan pada kegiatan non operasional lainnya berasal dari **Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (425912)** sebesar Rp 504.547.735 dikurangi dengan

- Settlement Piutang atas pengembalian temuan Inspektorat pada Sekdep sebesar Rp28.917.800
- Settlement Piutang atas pengembalian temuan Inspektorat pada Asdep Wawasan sebesar Rp64.044.183
- Settlement Piutang atas pengembalian temuan Inspektorat pada Asdep Karakter sebesar Rp177.530.315
- Settlement Piutang atas pengembalian beasiswa atas nama Arjuna Putra Aldino 2020 sebesar Rp17.000.000.



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

***Ekuitas Awal
Rp398,38 juta***

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas awal untuk periode yang berakhir pada **31 Desember 2024** dan **31 Desember 2023** adalah masing-masing sebesar **Rp398.380.460** dan **Rp166.379.147**. Nilai ekuitas awal tahun 2024 merupakan nilai ekuitas akhir Neraca per 31 Desember 2023 pada Laporan Keuangan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Periode 31 Desember 2023 (*Audited*).

***Defisit LO
(Rp80,43 miliar)***

E.2 Surplus / Defisit LO

Defisit LO untuk periode yang berakhir pada **31 Desember 2024** dan **31 Desember 2023** adalah sebesar **(Rp80.430.875.654)** dan **(Rp82.484.613.373)**. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

***Dampak
Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi
/Kesalahan
Mendasar Rp0***

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada **31 Desember 2024** dan **31 Desember 2023** adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

***Koreksi yang
Menambah/
Mengurangi
Ekuitas Rp0***

E.4 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada **31 Desember 2024** dan **31 Desember 2023** adalah sebesar **Rp0** dan **Rp17.000.000**.

***Penyesuaian Nilai
Aset Rp0***

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada **31 Desember 2024** dan **31 Desember 2023** adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

***Koreksi Nilai
Persediaan Rp0***

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada **31 Desember 2024** dan **31 Desember 2023** adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**.



**Koreksi atas
Reklasifikasi Rp0**

E.4.3 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada **31 Desember 2024** dan **31 Desember 2023** adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

**Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0**

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih revaluasi aset tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih revaluasi aset tetap untuk periode yang berakhir pada **31 Desember 2024** dan **31 Desember 2023** adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

**Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
Rp0**

E.4.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi nilai aset tetap non revaluasi untuk periode yang berakhir pada **31 Desember 2024** dan **31 Desember 2023** adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

**Koreksi Lain-lain
Rp0**

E.4.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada **31 Desember 2024** dan **31 Desember 2023** adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp17.000.000**.

**Transaksi Antar
Entitas Rp80,14
miliar**

E.5 Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir pada **31 Desember 2024** dan **31 Desember 2023** adalah masing-masing sebesar **Rp80.143.526.812** dan **Rp82.699.614.686**. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 24. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Akun	Uraian	2024	2023
313111	Ditagikan ke Entitas Lain	80.653.210.752	82.865.009.084
313121	Diterima dari Entitas Lain	(509.683.940)	(165.394.398)
Jumlah		80.143.526.812	82.699.614.686

**Kenaikan /
Penurunan
Ekuitas
(Rp287,35 juta)**

E.6 Kenaikan / Penurunan Ekuitas

Kenaikan ekuitas timbul karena terdapat defisit – LO yang lebih kecil dari nilai transaksi antar entitas. Kenaikan/penurunan ekuitas untuk periode **31 Desember 2024** dan **31 Desember 2023** adalah masing-masing sebesar **(Rp287.348.842)** dan **Rp232.001.313**. Rincian kenaikan/penurunan ekuitas untuk periode **31 Desember 2024** adalah sebagai berikut:



Tabel 25. Rincian Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Surplus/Defisit - LO	80.474.382.675	82.484.613.373
Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan	0	0
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	0	0
Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	0	17.000.000
Transaksi Antar Entitas	80.143.526.812	82.699.614.686
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	(330.855.863)	232.001.313

Ekuitas Akhir
(Rp111,03 juta)

E.7 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir pada tanggal **31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023** adalah masing-masing sebesar **Rp111.031.618** dan **Rp398.380.460**. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan saldo awal ekuitas, Surplus/Defisit LO, Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar dan Transaksi Antar Entitas.



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

1. Perubahan Manajemen

Terbitnya Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, membuat struktur kepemudaan berubah. Pada Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda terdapat perubahan nomenklatur yang menyebabkan perubahan unit kerja Eselon II dengan rincian sebagai berikut:

- Asisten Deputy Karakter Pemuda (mengampu fungsi yang ada pada Asisten Deputy IPTEK dan IMTAQ Pemuda);
- Asisten Deputy Wawasan Pemuda (mengampu fungsi yang ada pada Asisten Deputy Peningkatan Wawasan Pemuda);
- Asisten Deputy Potensi Kemandirian Pemuda (mengampu fungsi yang ada pada Asisten Deputy Tenaga dan Pengembangan Sumber Daya Pemuda, Asisten Deputy Peningkatan Kreativitas Pemuda dan PPPON);
- Asisten Deputy Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan (pindahan dari Deputy Bidang Pengembangan Pemuda mengurus terkait Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan); dan
- Asisten Deputy Bina Prasarana dan Sarana Pemuda (pindahan dari Deputy Bidang Pengembangan Pemuda mengurus terkait prasarana dan sarana kepemudaan).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, terdapat perubahan nomenklatur pada program kepemudaan yakni dengan bergabungnya Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Deputy Bidang Pengembangan Pemuda menjadi Deputy Bidang Pelayanan Kepemudaan. Selama tahun 2024 terdapat perubahan Eselon 2 yaitu pada unit Sekretariat Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda dari Suryati ke Triyono, SP, M.Si.

2. Bantuan Pemerintah

Tahun 2024, Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda memiliki anggaran bantuan pemerintah sebesar Rp 28.615.000.000 yang disalurkan kepada 456 lembaga/komunitas dengan rincian sebagai berikut:

No	Unit	Jumlah Lembaga	Anggaran
1	Asisten Deputy Karakter Pemuda	55 Lembaga	Rp 3.400.000.000
2	Asisten Deputy Wawasan Pemuda	44 Lembaga	Rp 2.250.000.000
3	Asisten Deputy Potensi Kemandirian Pemuda	100 Lembaga	Rp 4.950.000.000
4	Asisten Deputy Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan	88 Lembaga	Rp 12.030.000.000
5	Asisten Deputy Bina Prasarana dan Sarana Pemuda	169 Lembaga	Rp 5.985.000.000
TOTAL		456 Lembaga	Rp 28.615.000.000



3. Desain Besar Kepemudaan Nasional

Penyusunan Desain Besar Kepemudaan Nasional telah diinisiasi dari tahun 2021, mencerminkan upaya strategis pemerintah Indonesia dalam mengoptimalkan potensi pemuda sebagai aset bangsa. Pada tahun 2024, berbagai arahan dan masukan diberikan, seperti dari Wakil Presiden, Menteri Pemuda dan Olahraga, serta Deputy-deputy terkait, untuk mempercepat penyelesaian DBKN. Berikut adalah timeline penyusunan DBKN pada tahun 2024:

- a. Tanggal 25 Januari 2024 terdapat RTM yang dipimpin Wapres menekankan hal DBKN, “DBKN sebagai rujukan dalam upaya pembangunan kepemudaan di Indonesia, agar dirumuskan lebih terarah dan penyusunannya agar dapat segera diselesaikan.
- b. Tanggal 12 Februari 2024 terdapat arahan substansi dari Menpora melalui Stafsus. Asisten Deputy Karakter Pemuda telah menindaklanjutinya dengan melakukan revisi pada draft DBKN.
- c. Tanggal 8 Maret 2024 terdapat rapat yang membahas kesepakatan hal perubahan Perpres 43/2022 hal (KSLSPPK) dengan Deputy Bidang Pengembangan, antara lain menekankan bahwa hanya ada satu Perpres yakni DBKN. Di dalamnya termasuk strategi implementasi DBKN melalui peta jalan dalam bentuk koordinasi lintas sektor berupa Peraturan Menteri. Asisten Deputy Karakter Pemuda mengampu semua pendanaan finalisasi dan sosialisasi DBKN pada T.A 2024.
- d. Tanggal 26 Maret 2024 Asisten Deputy Karakter Pemuda mengirimkan Nota Dinas kepada Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda perihal Tindak Lanjut Percepatan Penyusunan Raperpres Desain Besar Kepemudaan Nasional dan membuat draft laporan Nota Dinas Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda kepada Menteri Pemuda dan Olahraga hal Penyusunan Desain Besar Kepemudaan Nasional dengan melampirkan draft DBKN versi 23 Maret 2024 Dokumen Nota Dinas.
- e. Tanggal 2 Mei 2024 Surat Permohonan Izin Prakarsa DBKN dikirimkan ke Presiden melalui Setneg.
- f. Terdapat Audiensi dengan Sekretariat Negara pada tanggal 13 Mei 2024 dan Audiensi dengan Sekretariat Kabinet pada tanggal 14 Mei 2024.
- g. Draft Permohonan Ratas dari Menteri Pemuda dan Olahraga yang ditujukan untuk Sekretariat Kabinet telah ditandatangani pada tanggal 9 Juni 2024.
- h. Tanggal 7 Juni 2024 Surat dari Menteri Sekretaris Negara bahwa Izin Prakarsa belum disetujui dan dikembalikan ke K/L untuk pembahasan ulang.

Bulan Oktober 2024 terdapat pemotongan pagu anggaran untuk keperluan kenaikan Tunjangan Kinerja pada alokasi anggaran penyusunan Desain Besar Kepemudaan. Sehingga sampai dengan akhir tahun tidak terdapat realisasi lagi terkait dengan penyusunan Desain Besar Kepemudaan.

4. BA BUN Kwartir Nasional pada Asisten Deputy Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan



Terdapat penyelenggaraan kegiatan Jambore Nasional Gerakan Pramuka ke-XI tahun 2022 oleh Kwartir Nasional. Dalam hal ini Kwartir Nasional mengajukan usulan tambahan melalui BA BUN. Setelah melalui beberapa rapat yang diikuti oleh perwakilan dari Kwarnas, Direktorat Jenderal Anggaran dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, disepakati bahwa terdapat usulan tambahan anggaran sebesar Rp15.000.000.000 dengan metode *sharing cost* yang bersumber dari BA BUN senilai Rp.14.000.000.000 dan dari Kemenpora senilai Rp.1.000.000.000 yang dibebankan pada anggaran Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan tahun 2024.

Hasil akhir dari kesepakatan tersebut terdapat pada Surat dari Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu nomor S-241/MK.2/2024 perihal Tanggapan atas Usulan Tambahan anggaran melalui Pergeseran BA BUN untuk Pelaksanaan Jambore Nasional Gerakan Pramuka XI Tahun 2022. Namun sampai dengan akhir tahun belum dilakukan reviu oleh BPKP mengenai seluruh pengeluaran atas penyelenggaraan Jambore Nasional Gerakan Pramuka XI Tahun 2022. Hal tersebut menyebabkan usulan tambahan anggaran tersebut belum dapat direalisasikan pada anggaran yang sebelumnya telah dialokasikan pada Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan.

5. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks ini diukur secara statistik oleh Badan Pusat Statistik (BPS). IPP disusun berdasarkan tiga lapisan domain pembangunan pemuda yang menjadi ruang lingkup IPP, yaitu pembangunan individu, pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, serta partisipasi dan diskriminasi terhadap pemuda di berbagai bidang. Melalui tiga lapisan ini, IPP menangkap aspek lintas bidang dari pembangunan pemuda dan mengakomodasi peran pemuda sebagai objek dan subjek pembangunan. Dalam kerangka penyusunan IPP, aspek-aspek pembangunan pemuda tersebut dikelompokkan ke dalam 5 domain dengan 15 indikator penyusunnya. Indeks Pembangunan Pemuda mengalami kenaikan sebesar 1 poin dari 55,33 di tahun 2022 menjadi 56,33 di tahun 2023.

6. Keterbukaan Informasi Publik Dengan Kategori Menuju Informatif

Sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan Informasi publik pada Badan Publik Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda meraih predikat menuju informatif dengan nilai 99,41. Hal ini lebih baik dibandingkan dengan capaian sebelumnya.

7. Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik

Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda mendapatkan predikat Sangat Baik dengan nilai 90,56 pada Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.